BUKU

PROFESI KEPENDIDIKAN

Muhammad Hakiki, S.Pd., M.Pd.T

Radinal Fadli S.Pd., M.Pd.T

Guru merupakan suatu jabatan profesi, sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang guru yang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif.

Hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang profesional dituntut untuk terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional.

Guru adalah tenaga profesional yang berkewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik, agar kehormatan guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya dapat terpelihara. Selain itu tugas utama guru adalah berusaha mengembangkan segenap potensi siswanya secara optimal, agar mereka dapat mandiri dan berkembang menjadi manusia-manusia yang cerdas, baik cerdas fisik maupun cerdas intelektual, sosial, emosional dan lain-lain.

Untuk memperoleh keberhasilan pendidikan, keberadaan profesi guru sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam hal ini kinerja guru sebab kinerja guru merupakan kemampuan yang ditunjukkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Kinerja guru dapat diamati melalui unsur perilaku yang ditampilkan guru sehubungan dengan pekerjaan dan prestasi yang dicapai berdasarkan indikator kinerja guru.

978-623-315-728-5

9 786233 157285

BUKU PROFESI KEPENDIDIKAN

Muhammad Hakiki, S.Pd., M.Pd.T
Radinal Fadli S.Pd., M.Pd.T

BUKU

PROFESI

KEPENDIDIKAN

Muhammad Hakiki, S.Pd., M.Pd.T
Radinal Fadli S.Pd., M.Pd.T

BUKU PROFESI KEPENDIDIKAN

Muhammad Hakiki, S.Pd., M.Pd.T

Radinal Fadli S.Pd., M.Pd.T

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

BUKU PROFESI KEPENDIDIKAN

Penulis:

Muhammad Hakiki, S.Pd., M.Pd.T
Radinal Fadli S.Pd., M.Pd.T

ISBN : 978-623-315-728-5

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Eka Safitry

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia-Nya sehingga Buku Profesi Kependidikan ini dapat selesai disusun.

Buku ini ditulis untuk membantu peserta didik dan juga tenaga kependidikan dalam memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan profesi kependidikan, dalam buku ini disusun secara sistematis materi-materi yang berhubungan dengan profesi kependidikan disertai dengan contoh-contoh yang sering ditemui dalam proses pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik sehingga tenaga kependidikan dapat lebih mudah menjelaskan materi sesuai dengan konsep-konsep profesi kependidikan.

Selain Materi, buku ini juga mencakup kegiatan yang dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami poroses pelaksanaan pendidikan serta bagaimana dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Materi pada buku ini banyak diambil dari berbagai sumber yang relevan. selain itu, pengalaman mengajar penulis selama bertahun-tahun didalam kelas serta dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan juga pengalaman dalam menyusun berbagai buku pelajaran sehingga sangat membantu merampungkan penulisan buku ini.

Muara Bungo,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDIDIKAN NASIONAL SERTA KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1
A. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional	1
B. Syarat Tugas, Hak Serta Kewajiban dan Tenaga Kependidikan.....	6
BAB II HAKIKAT PROFESI KEPENDIDIKAN	10
A. Pengertian Profesi, Profesional, Profesionalisme, Profesionalitas dan Profesionalisasi	10
B. Karakteristik dan Syarat-syarat Profesi Kependidikan.....	11
C. Guru sebagai jabatan Profesi	13
BAB III PERKEMBANGAN PROFESI KEPENDIDIKAN DI INDONESIA	16
A. Masa Penjajahan	16
B. Masa Kemerdekaan.....	17
C. Perkembangan Pendidikan pada Masa Reformasi	18
BAB IV TINGKAT DAN JENIS PROFESI KEPENDIDIKAN	20
A. Tingkat Profesi Kependidikan.....	20
B. Jenis Profesi Kependidikan.....	21
BAB V KODE ETIK PROFESI KEPENDIDIKAN	26
A. Pengertian Profesi	26
B. Kode Etik Profesi	29
C. Syarat-Syarat Profesi.....	30
D. Perkembangan Profesi Guru.....	32
E. Profesi Keguruan.....	34
F. Tujuan Kode Etik Profesi Guru	37
G. Penetapan Kode Etik.....	39
H. Fungsi Kode Etik Profesi	39
I. Sanksi Pelanggaran Kode Etik.....	40
J. Kode Etik Guru Indonesia	41
K. Organisasi profesional keguruan di Indonesia: PGRI, MGMP, KKG	43

BAB VI	ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN.....	46
	A. Tujuan Organisasi Profesi	46
	B. Fungsi Organisasi Profesi	47
	C. Peran Organisasi Profesi.....	48
	D. Macam Dan Bentuk Organisasi Profesi	49
	E. Pengembangan Organisasi Profesi.....	49
BAB VII	INTEGRITAS DAN SIKAP PROFESIONAL	
	DALAM KEPENDIDIKAN.....	51
	A. Profesi Guru Sebagai Panggilan Jiwa	51
	B. Teori Kepribadian.....	53
	C. Pengembangan Organisasi Profesi & Pengembangan Sikap Profesional Kependidikan di Indonesia	54
	B. Peran Organisasi Profesi Kependidikan di Indonesia.....	59
	C. Sikap Profesional Kependidikan di Indonesia	62
BAB VIII	PROFESI KEPENDIDIKAN DI BIDANG	
	LAYANAN INSTRUKSIONAL	72
	A. Profesi Kependidikan Dibidang Layanan Instruksional	72
BAB IX	PROFESI KEPENDIDIKAN DI BIDANG	
	LAYANAN ADMINISTRASI DAN BIMBINGAN	
	PENILAIAN KINERJA GURU	81
	A. Profesi Kependidikan.....	81
	B. Profesi Kependidikan dibidang Administrasi	82
	C. Peranan Guru dalam Administrasi Pendidikan.....	86
	D. Pendidikan di Layanan Bimbingan Pendidikan	87
	E. Tujuan Pendidikan di Layanan Bimbingan Pendidikan.....	88
	F. Landasan Pendidikan di Layanan Bimbingan Pendidikan.....	89
	G. Peran Pendidikan di Layanan Bimbingan Pendidikan.....	91
BAB X	PENILAIAN KINERJA GURU	93
	A. Pengertian Kinerja Guru	93
	B. Penilaian Kinerja Guru	94

	C. Prinsip Pelaksanaan Penilaian kinerja guru	98
	D. Prinsip Penilaian.....	100
	E. Perangkat Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru	101
	F. Aspek Penilaian	101
	G. Prosedur Pelaksanaan Penilaian	102
	H. Upaya Peningkatan Kinerja Guru	103
BAB XI	PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, DAN PENGHARGAAN PROFESI KEPENDIDIKAN	105
	A. Definisi Pengakuan, Perlindungan, dan Penghargaan Profesi Kependidikan	105
	B. Perlindungan Atas Hak-Hak Guru.....	107
	C. Jenis Upaya Perlindungan Hukum Bagi Guru.....	113
	D. Penghargaan dan Kesejahteraan	117
	E. Tunjangan Guru	119
BAB XII	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PROFESIONALISASI GURU SERTA TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU SERTA UPAYA PEMECAHANNYA	124
	A. Pengertian Pengembangan Profesi Keguruan.....	124
	B. Sikap Profesionalitas	126
	C. Pengembangan Profesi Guru	133
	D. Pengertian Problematika dan Tantangan.....	157
	E. Tantangan Profesionalisme Guru	161
BAB XIII	SUPERVISI PENDIDIKAN DAN REFLEKSI INDIVIDU	174
	A. Supervisi Pendidikan.....	174
	DAFTAR PUSTAKA	182

BAB I

PENDIDIKAN NASIONAL SERTA KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah usaha memberikan bimbingan dari akar kebudayaan bangsa itu sendiri terhadap seluruh warga negaranya, sehingga terbentuklah warga yang berpengetahuan, berkependidikan, bermental yang tinggi, berakhlak mulia, tanggung jawaban, siap mengembangkan amanat meneruskan perjuangan bangsa yang dipikulkan kepadanya dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pendidikan nasional terdapat dasar, fungsi dan tujuan. Adapun dasar, fungsi dan tujuan pada pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pendidikan Nasional

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau sandaran dari pada dilakukannya suatu perbuatan. Jadi, yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan pendidikan.

Adapun Dasar Pendidikan Nasional bagi bangsa Indonesia, dapat di klasifikasikan menjadi dasar ideal, dasar konstitusional, dan dasar operasional.

a. Landasan dasar pendidikan nasional merupakan pancasila

Pancasila adalah dasar Negara, penetapan pancasila sebagai dasar negara adalah hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa Indonesia. Maka dari itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara Indonesia setiap warga negaranya

harus berlandaskan kepada pancasila, terutama dibidang pendidikan yang mewajibkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia harus membentuk warga negara yang berjiwa pancasila, yang meliputi:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Dasar konstitusinal

Pendidikan Nasional UUD 1945 adalah dasar negara republik Indonesia sebagai sumber hukum dan UUD 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas bagi warga negaranya, terutama di bidang pendidikan. Karena UUD 1945 sebagai sumber hukum, maka sumber-sumber hukum lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana yang termasuk dalam UUD 1945 BAB XIII pasal 31 ayat 1 dan 2:

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system.

c. Dasar operasional

Salah satu dasar operasional dari pada pendidikan Nasional adalah keputusan Presiden No.145 tahun 1965, tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional menerangkan: "Pancasila adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu, dasar/asas pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah Pancasila".

d. Dasar Sosial Budaya

Pendidikan merupakan proses atau alat mewariskan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan nasional merupakan proses dan merupakan alat mewariskan kebudayaan. Manusia Indonesia terbina oleh tata nilai sosial budayanya sendiri dan manusia Indonesia merupakan pewaris dan penerus tata nilai tersebut.

2. Fungsi Pendidikan Nasional

Untuk mewujudkan masyarakat budaya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pendidikan nasional harus berfungsi sebagai:

- a. Pengembangan Pribadi.
- b. Pengembangan warga Negara.
- c. Pengembangan bangsa.

Tujuan pendidikan nasional diharapkan dapat meningkatkan ketaqwaan Terhadap Tuhan Maha Esa serta mampu meningkatkan kecerdasan, keterampilan, keahlian dan berbagai aspek efektif mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan". Maka dari itu dapat dijelaskan melalui beberapa poin yang menjadi tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memperkuat kepribadian Pancasila.
- c. Mempertebal semangat kebangsaan.
- d. Meningkatkan kecerdasan.
- e. Meningkatkan keahlian.
- f. Meningkatkan kebudayaan.
- g. Mempertinggi budi pekerti.
- h. Mengembang-suburkan sikap demokrasi.
- i. Memelihara kerukunan hidup.
- j. Berkesanggupan untuk membangun diri dan masyarakat.

Adapun fungsi pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meingkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan Nasional negara kita jelas termasuk dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional.

3. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan dari pendidikan nasional disarikan pada sebuah usaha yang dilakukan untuk memperolehnya, kemudian arah dari tujuan pendidikan nasional menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh sebuah lembaga pendidikan untuk mencapainya serta jalan yang harus tempuh mulai dari titik awal dan mencapai tujuan pada titik finish. Tujuan pendidikan bagi suatu bangsa dan titik dasarnya merupakan pandangan hidup serta pada titik akhirnya merupakan tercapainya kepribadian hidup

yang dicita-citakan. Ketentuan tujuan arah hidup suatu bangsa akan tertuang pada Undang-Undang Dasar bangsa itu sendiri. Dengan demikian dapatlah dikemukakan tentang dasar-dasar dari pada tujuan pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia sebagai berikut :

- a. Pancasila, disamping sebagai dasar negara, ia juga sebagai tujuan yaitu cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, maka pendidikan sebagai alat pun juga berlandaskan Pancasila, agar bisa menghasilkan anak didik menjadi manusia-manusia Pancasila yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pada alinea keempat disebutkan : Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan Pancasila.
- c. UU Pendidikan dan Pengajaran No.12 Tahun 1954 Bab II pasal 3 yang berbunyi: Tujuan pendidikan dan pembelajaran adalah merupakan keharusan bagi setiap usaha/kegiatan agar mencapai efesiensi yang sebesar-besarnya. Segala usaha/kegiatan adalah harus bertujuan demikian pula pendidikan. "Orang-orang yang tidak mempunyai batas dan ketentuan rujukan hidupnya dan membiarkan waktu berlalu begitu saja adalah semacam benda yang tidak bernyawa, sedikitlah harapan bahwa mereka dapat menimbulkan keuntungan atau pekerjaan yang besar".
- d. TAP MPR No.II/MPR/1978. Tentang P-4 (Eka Prasetya Pancakarsa) menyatakan: "Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadarannya untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial". Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya

masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- e. TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang GBHN mengenai pendidikan dijelaskan: "Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Tujuan Pendidikan Nasional membangun kualitas manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai warga negara berjiwa Pancasila harus mempunyai semangat yang tinggi dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetika, berkesanggupan membangun diri dan masyarakatnya.

B. Syarat Tugas, Hak Serta Kewajiban dan Tenaga Kependidikan

Berikut ini merupakan syarat tugas, hak serta kewajiban dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Tugas tenaga kependidikan

UU No. 20 Tahun 2003 pasal 39 menjelaskan Tugas tenaga kependidikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- b. Tenaga kependidikan harus bersikap profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.

2. Hak-hak tenaga kependidikan

Tenaga Kependidikan mempunyai tanggungjawab yang bermacam-macam, serta akan diimplementasi kedalam bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Tugas pendidik melingkupi ranah profesi pendidikan, ranah kemanusiaan serta ranah kemasyarakatan. Tugas tenaga pengajar atau guru merupakan profesi yang meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik dapat diartikan mengembangkan dan melanjutkan asas-asas hidup dan kehidupan. Mengajar mengembangkan dan meneruskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir, melatih berarti menumbuhkan keterampilan-keterampilan siswa menjadi lebih baik.

Tenaga kependidikan sesuai UU guru dan dosen yang berlandaskan UU No. 14/2005 pasal 14 ayat 1, menjelaskan bahwa:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.

- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak tenaga kependidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 1, menjelaskan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil dari kekayaan intelektual.
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Seorang tenaga pendidik harus paham terhadap fungsi dan tugasnya, salah satunya seorang guru harus dibekali dengan ilmu dibidang keguruan sebagai dasar, serta mempunyai teori-teori keterampilan melatih dalam bidang pendidikan dan pada situasi tersebut guru dapat mensosialisasikan sikap keguruan yang diajarkan sesuai dengan tindakan yang mencerminkan seorang tenaga pendidik. Guru harus mampu mentransformasikan keterampilan keguruannya kepada anak didik atau siswanya.

Guru harus mampu dan paham terhadap fungsi dan tugasnya bukan sekedar perantara ilmu, tetapi haru mampu menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat.

Seorang guru profesional atau tenaga pendidika memiliki Fungsi dan tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan kebudayaan kepada siswa berupa ilmu, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.

- b. Membangun kepribadian siswa yang harmonis sesuai cita-cita dan Undang-Undang Dasar negara Indonesia serta Pancasila.
- c. Undang-Undang Pendidikan No. 2 Tahun 1983 sebagai perantara dalam belajar guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik menuju arah kedewasaan serta membentuk siswa menjadi warga negara Indonesia yang baik dan berbudi pekerti.

3. Kewajiban Tenaga Kependidikan

Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, memberikan pengertian bahwa tenaga pendidikan merupakan perwakilan masyarakat yang mengabdikan dirinya serta diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Pasal 1 ayat 5), sedangkan tenaga pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (pasal 1 ayat 6). Maka dari itu, pendidik itu merupakan tenaga kependidikan, tetapi tenaga kependidikan belum tentu pendidik.

Kewajiban tenaga kependidikan berdasarkan Undang-Undang SISDIKNAS pasal 40 ayat 2, adalah:

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB II

HAKIKAT PROFESI KEPENDIDIKAN

A. Pengertian Profesi, Profesional, Profesionalisme, Profesionalitas dan Profesionalisasi

1. Profesi

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer. Profesi berasal dari bahasa latin yakni "*Proffesio*" yang mempunyai dua arti yaitu janji/ikrar dan pekerjaan.

Profesi berasal dari kata *proffesion* yang berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan dukungan badan ilmu (*body of knowledge*) sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi banyak tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan (*altruism*).

2. Profesional

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini

juga pengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan di profesinya (cara orang bekerja, unjuk kerja, jabatan). Contoh: Guru di siplin bisa disebut juga guru yang professional dengan pekerjaannya.

3. Profesionalisme

Profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas sebagai sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan profesionalismenya. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. Profesionalisme adalah sikap terhadap profesi (seorang yang memegang profesi sebagai guru dia tidak puas).

4. Profesionalitas

Profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi benar-benar menguasai, sungguh-sungguh kepada profesinya. Profesionalitas adalah hal-hal yang menyangkut mutu diri profesi. Contoh: pelatihan guru.

5. Profesionalisasi

Profesionalisasi adalah proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional. Profesionalisasi adalah kegiatan membuat orang yang memegang profesi, mendidik orang, Contoh: Guru lewat sekolah guru, Dokter lewat sekolah dokter, Perawat lewat sekolah perawat.

B. Karakteristik dan Syarat-syarat Profesi Kependidikan

Profesi kependidikan adalah suatu tenaga kependidikan yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam mekanisme kerjanya di kuasai kode etik.

Karakteristik profesi kependidikan, sebagai berikut:

1. Tidak mementingkan kepentingan pribadi dari pada pelayanan kemanusiaan dan juga masyarakat.
2. Seorang yang professional, harus meningkatkan pengetahuannya serta mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya untuk memasuki profesi tersebut serta mampu meningkatkan pengetahuannya yang berfungsi dalam pertumbuhan jabatan.
4. Mempunyai kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
2. Memiliki suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
3. Adanya suatu pengalaman organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya.
4. Memiliki kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
5. Menempatkan sebagai seorang yang profesional dalam suatu karier hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Syarat-syarat Profesi Kependidikan yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
3. Memiliki tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
4. Mempunyai kepekaan terhadap dampak yang diberikan kepada masyarakat dari pekerjaan yang dilaksanakannya
2. Mempunyai perkembangan ilmu yang sejalan dengan dinamika kehidupannya.

Syarat sebuah profesi dijelaskan AECT (Association for Educational Communication and Technology) dan dinyatakan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia I pada tahun 1988, keduanya memberikan beberapa syarat dalam

mendefinisikan suatu profesi, secara garis besar harus ada: Latihan dan Sertifikasi, Standard dan Etika, Kepemimpinan, Asosiasi dan Komunikasi, Pengakuan Sebagai Profesi, Tanggung Jawab Profesi dan Hubungan dengan Profesi Lainnya.

Hal-hal berikut untuk memenuhi persyaratan profesi pendidik, yaitu: Pertama, perlunya diperkenalkan penjelasan pengertian pendidikan bagi calon pendidik memberikan kesempatan berpikir untuk memahami profesi mendidik tersebut. Kedua, perlu dikembangkan kepada calon pendidik kriteria keberhasilan mendidik, keberhasilan ini bukan atas prestasi akademik pendidik namun lebih dicerminkan oleh keberhasilan mendidik dengan kriteria-kriteria tertentu seperti Memiliki sikap suka belajar, tahu tentang cara belajar dan lainnya. Ketiga, memperkenalkan perilaku di lapangan yang dapat dipilih beberapa di antaranya yang sesuai dengan tujuan pendidikan setiap kali tatap muka.

C. Guru sebagai jabatan Profesi

Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien. Profesi guru merupakan keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. UU No.20/2003, Pasal 39 Ayat 2 bahwa guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi guru/pendidik pada perguruan tinggi.